

# **KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DALAM MERESPON DOMINASI CHINA PADA KERANGKA INDO-PASIFIK TAHUN 2013 - 2018**

**Oleh : Nabila Hanum**

**Email : [hanumnabila6@gmail.com](mailto:hanumnabila6@gmail.com)**

**Pembimbing : Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel**

**Bibliografi : 15 Buku, 36 Jurnal, 70 Situs Web, 15 Dokumen Resmi**

**Jurusan Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294**

**Telp/Fax. (0761) – 63277, 23430**

## ***Abstract***

*The focus of this paper explains the foreign policy of Australia regarding the domination and expansion of China in Indo-Pacific. China's rise which consists of economic and military revolution, partnership, investment, and trade, has remade the landscape of regional system and also created tensions for other countries. Australia notices that China's economic power will have geopolitical implications that will affect its national interest in the future. That is why Australia must have a good strategy and foreign policy to counter China's influence while remains engaged and builds a strong partnership with China.*

*This paper uses the perspective of Neorealism which focuses on the anarchy structure, distribution of power, security dilemma, and also the balance of power in the system. Using the balancing and engagement theory, this research aims to unveil Australia's strategy and approach to China's rise. The hypothesis examined using the level of analysis of the nations as it directly related to Australia's Foreign Policy White Paper 2017 that primarily focuses on Indo-Pacific opportunities for Australia.*

*This research shows the Australian government has a strong commitment to create a peaceful and open Indo-Pacific region to coordinate its position by building and increasing cooperation and partnership with other countries around Indo-Pacific. So that they can achieve a balance of power in order to counter and moderate China's influence and border its growth in the vast and complex Indo-Pacific region, so that it is not overlapped with the interest of other countries. Meanwhile, Australia also tries to remain engaged with China by increasing the partnership and investment to preserves the strong and good relationship between both countries.*

***Keywords: Indo-Pacific, Foreign Policy White Paper, China Rise, Domination, Balancing and Engaging.***

## PENDAHULUAN

Setelah berakhirnya perang ideologi Barat dan Timur—atau yang dikenal dengan Perang Dingin—Amerika Serikat (AS) memang muncul sebagai negara yang dominan. Namun tatanan dunia baru yang kemudian terbentuk menekankan pada pentingnya kekuatan ekonomi bagi kelangsungan dan kedaulatan suatu negara. Negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang besar kemudian muncul menyaingi dominasi AS dalam mempengaruhi sistem internasional.<sup>1</sup>

Perubahan ini sejalan dengan berlangsungnya fenomena globalisasi di mana dunia mengalami percepatan perubahan serta meningkatnya hubungan antar negara dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial.<sup>2</sup>

Tiongkok adalah salah satu negara yang sejak berakhirnya Perang Dingin muncul sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia yang berkembang dengan cepat menyaingi pertumbuhan AS. Di abad ke-21 Tiongkok telah menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer yang kuat dan ekonomi yang berpengaruh secara global.

Kekuatan Tiongkok baik dalam aspek perekonomian dan kemiliteran jauh lebih besar jika dibandingkan dengan negara-negara pada kawasan regional Asia, sehingga kekhawatiran akan dominasi Tiongkok tidak dapat dielakkan.

Kebangkitan serta dominasi Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik menuai berbagai macam respon dari negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Australia adalah salah satu negara yang merasakan dampak dari kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia.

Hubungan Australia dan Tiongkok pada dasarnya terjadi karena pengaruh geopolitik dan strategis global, namun semenjak tahun 1980 kedua negara telah membangun berbagai hubungan serta kepentingan bilateral dan regional bersama, termasuk ikatan perdagangan yang kuat.<sup>3</sup> Pada tahun 2014, Perdana Menteri Australia dan Presiden Tiongkok sepakat untuk menggambarkan hubungan diplomatik tersebut sebagai, “kemitraan strategis yang komprehensif”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>George Friedman, “Beyond The Post-Cold War World,” 2013, diakses pada tanggal 04 November 2019,

<https://worldview.stratfor.com/article/beyond-post-cold-war-world>

<sup>2</sup> Marius-Răzvan Surugiu and Camelia Surugiu, "International Trade, Globalization and Economic Interdependence between European Countries: Implications for Businesses and Marketing Framework." 2015, *Procedia Economics and Finance*, Vol. 32 Desember 2015, hal. 132

---

<sup>3</sup>Stephen Sherlock, “Australia Relation with China; What is The Problem?” diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, [https://www.aph.gov.au/sitecore/content/Home/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/Publications\\_Archive/CIB/CIB9697/97cib23#POWER](https://www.aph.gov.au/sitecore/content/Home/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/CIB/CIB9697/97cib23#POWER).

<sup>4</sup>“China Country Brief,” Department of Foreign Affairs and Trade, diakses pada tanggal 04 November 2019, <http://dfat.gov.au/geo/china/Pages/chinacountrybrief.aspx#targetText=After%20establishing%20diplomatic%20relations%20with,visits%20and%20wide-ranging%20cooperation>.

Optimalisasi kebijakan luar negeri Australia merupakan sesuatu yang menarik untuk dibahas, karena berkaitan langsung dengan kepentingan dan keamanannya di kawasan tersebut. Jika dikaitkan dengan hubungan bilateral yang bersangkutan dengan hegemoni Tiongkok; sengketa Laut Cina Selatan, proyek mega *Belt and Road Initiative*, dan melemahnya komitmen dan kekuatan Amerika Serikat sebagai sekutu utama Australia di kawasan Indo-Pasifik tersebut, maka keputusan atau pun kebijakan luar negeri yang dikeluarkan negara Australia menggunakan kerangka Indo-Pasifik ini adalah sesuatu yang menarik untuk diamati.

## KERANGKA TEORI

### a. Perspektif: Neo-realisme

Hubungan internasional melalui perspektif Neorealisme menggambarkan bahwa hubungan yang terjadi antar negara terkonstruksi diatas sistem yang anarkis sehingga cenderung bersifat antagonistik dan konfliktual, sehingga dapat mengancam kelangsungan negara tersebut.<sup>5</sup>

Tanpa adanya otoritas global menyeluruh yang menyediakan keamanan dan stabilitas dalam hubungan internasional, perpolitikan dunia cenderung tidak terorganisir dan memiliki hirarki, sehingga setiap bertanggung jawab untuk bisa melindungi dirinya sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> David A. Baldwin. 1993. *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. Columbia University Press, Part I & II, pp. 1-142.

<sup>6</sup> Laura Neack, *The New Foreign Policy : Power Seeking in a Globalized Era Second*

Negara memiliki cara yang berbeda untuk mempertahankan negaranya karena itu menganalisis bagaimana perilaku negara yang berbeda dalam merespon suatu perubahan struktur lingkungan regional ataupun internasional sangatlah penting, hal ini berdasarkan kepada keharusan bagi setiap negara pemilik kepentingan untuk memperjuangkan keberlangsungan serta keamanan negaranya di bawah kondisi yang anarkis. Karena adanya perasaan dan potensi ancaman terhadap kedaulatannya, negara akan tetap berusaha untuk meningkatkan dan memperluas kemampuannya untuk mencapai kepentingan nasional negaranya.<sup>7</sup>

Melalui pendekatan neorealisme, analisis kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok akan didasarkan pada pertimbangan bahwa Australia menginginkan kepentingan nasionalnya, baik ekonomi dan militer, tetap terjaga walaupun Tiongkok semakin memperkuat dominasinya di kawasan Indo-Pasifik, sehingga kepentingan kedua negara tidak saling bertentangan. Dalam hal ini Australia mengeluarkan seperangkat kebijakan luar negeri yang akan menjadi acuan untuk meningkatkan kemampuan Canberra dalam mencapai keseimbangan kekuatan dengan strategi *balancing* dan *engagement*.

### b. Tingkat Analisa: Negara – Bangsa

---

*Edition* (United States of America : Rowman and Littlefield Publisher Inc., 2008), hal. 14.

<sup>7</sup> Elif Dibek, “What are The Basic Concept of Neorealism,” diakses pada tanggal 3 November 2019, [https://www.researchgate.net/post/What\\_are\\_the\\_basic\\_concepts\\_of\\_neorealism](https://www.researchgate.net/post/What_are_the_basic_concepts_of_neorealism)

Untuk memahami objek permasalahan dalam sebuah penelitian, diperlukannya sebuah tingkat analisis yang tepat. Tingkat analisis yang digunakan dalam memahami kebijakan luar negeri ada tiga yaitu tingkat individu, negara bangsa, dan sistem internasional.<sup>8</sup>

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara-bangsa. Negara diartikan sebagai integrasi kekuatan politik, organisasi kekuasaan, alat dari yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia di dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Pada dasarnya hubungan internasional didominasi oleh negara-bangsa, sehingga kenyataan yang ada lebih dicerminkan oleh perilaku negara bangsa.

Australia memiliki sistem dan intitusi demokrasi yang kuat, serta masyarakat yang bebas dan terbuka untuk menyampaikan pendapat, proses perumusan kebijakan di dasarkan kepada kepentingan yang ingin dicapai oleh negara dan kedaulatan orang banyak.

#### **c. Teori Balance of Power (Balancing and Engagement)**

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *balance of power (Balancing and Engaging)*. Teori *balance of power* atau keseimbangan kekuatan merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam hubungan internasional. Teori ini menjelaskan tentang kebijakan suatu negara atau

kelompok negara untuk melindungi dirinya dari negara atau kelompok negara lain dengan menyeimbangkan kekuatannya dengan kekuatan negara tersebut.<sup>10</sup>

Strategi ini disebut juga dengan *strategic hedging*, yang merupakan kombinasi dari *engaging* dan *indirect* atau *soft balancing* dan digunakan untuk mengurangi resiko atau kerugian tidak diharapkan di masa yang akan datang karena adanya ketidak pastian dan perubahan di lingkungan internasional.<sup>11</sup>

Melalui *Hedging* penulis akan bisa melihat bagaimana Australia menjaga hubungan ekonominya dengan Tiongkok di tengah ketidak pastian dan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negaranya. Bersamaan dengan kerja sama atau usaha *balancing* Australia dengan Amerika dan juga negara-negara di kawasan Indo-Pasifik lainnya.

#### **d. Konsep Kepentingan Nasional**

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional yang mengacu kepada tujuan pemerintah untuk memenuhi serta mempertahankan kedaulatan negaranya di lingkungan internasional

Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pandangan pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional yang

---

<sup>10</sup> Balance of Power, Op.Cit.

<sup>11</sup> Lai-Ha Chan, "Australia's Strategic Hedging in The Indo-Pacific : The Third Way beyond either China or US," 2019, *Australia-China Relations Institute*, hal. 3.

---

<sup>8</sup>Neack, Op.Cit., hal. 27.

<sup>9</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hal. 91.

dirumuskan oleh Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin yaitu:

1. *Defense Interest*
2. *Economic Interest*
3. *World-Order Interest*
4. *Ideology Interest*

### **HASIL DAN PEMBAHASAN** **Arti Penting Kawasan Indo-Pasifik bagi Tiongkok dan Australia**

Kawasan Indo-Pasifik menjadi arena perebutan geopolitik yang semakin tumbuh karena fungsi dan kekayaan yang dimiliki oleh kawasan tersebut bersangkutan dengan kepentingan banyak negara seperti Tiongkok, Australia, Jepang, India, dan negara-negara keanggotaan ASEAN.

Kawasan ini juga merupakan tempat penyebaran pengaruh kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan aliansinya. Kepentingan ini lah yang kemudian memberikan kontribusi yang besar dan menjadi salah satu pendorong bagi negara-negara dalam menentukan sikap dan kebijakan luar negerinya.

Selama satu dekade terakhir telah banyak negara yang mengeluarkan strategi dan pendekatan terhadap kawasan Indo-Pasifik untuk menjaga keterbukaan dan kebebasan bernavigasi sehingga tidak menimbulkan konflik regional ataupun internasional. Amerika Serikat dengan *Free and Open Indo-Pacific*, Indonesia melalui *ASEAN Indo-Pacific Outlook*, dan Australia mengeluarkan seperangkat kebijakan luar negeri yang di dalamnya membahas tentang kawasan Indo-Pasifik.

Kawasan Indo-Pasifik merupakan wilayah perairan yang meliputi Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, berhubungan langsung dengan wilayah Asia Tenggara termasuk India, Asia

Utara, dan Amerika Serikat.<sup>12</sup> Indo-Pasifik juga diartikan sebagai sebuah strategi dan konsep yang dikaitkan dengan kebangkitan dan meningkatnya pengaruh Tiongkok di wilayah samudra Hindia dan Samudera Pasifik.

Jika dikaitkan dengan kepentingan nasional Australia, pada *Foreign Policy White Paper* tahun 2017, konsep Indo-Pasifik dijelaskan memiliki kegunaan dan keuntungan terhadap hubungan internasional negara Australia. Istilah Indo-Pasifik menekankan perkembangan geografis wilayah tersebut, serta membuka gerbang kerja sama bagi Australia dengan negara seperti Indonesia, India, Jepang, dan lainnya.<sup>13</sup>

### **Hubungan Australia dan Tiongkok Sebelum Keluarnya *Foreign Policy White Paper 2017***

Dalam bab ini penulis akan mengkaji bagaimana hubungan diplomatik antara Australia dan Tiongkok sebelum dikeluarkannya *Foreign Policy White Paper 2017* baik dalam bidang ekonomi atau pertahanan, konflik yang terjadi, serta hubungan antara Australia, Amerika, dan Tiongkok. Australia merupakan salah satu negara yang memiliki kedekatan politik dengan negara-negara di kawasan Asia, khususnya dalam kepentingan strategi dan ekonomi.

Upaya politik luar negeri dan diplomasi ditujukan untuk mendukung dan memastikan tercapainya kepentingan nasional Australia yang berpegang pada

---

<sup>12</sup>“*Foreign Policy White Paper 2017*,” Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), 2017, hal. 1.

<sup>13</sup> Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Op.Cit., hal. 4.

prinsip pelaksanaan kebijakan luar negeri berdasarkan tatanan aturan internasional (*rules-based international order*) yang mengatur bagaimana negara berinteraksi dengan negara lain dalam lingkungan internasional berdasarkan hukum dan peraturan internasional yang ada.<sup>14</sup>

Pada tahun 1940-an Australia melihat Tiongkok sebagai ancaman keamanan, namun pemikiran tersebut mulai hilang pada tahun 1970-an meskipun kewaspadaan terhadap Tiongkok sebagai negara yang berpengaruh secara politik dan strategis masih tetap ada.

Meningkatnya pertumbuhan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik secara langsung telah mempengaruhi pertumbuhan Australia yang kini menjadi rekan dagang terbesar bagi Beijing. Hubungan perdagangan dan strategis keduanya telah dijalin oleh Australia dan Tiongkok jauh sebelum *Foreign Policy White Paper 2017* dikeluarkan dan menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melihat arah kebijakan luar negeri Australia dan bagaimana implementasinya.

Kesuksesan perdagangan dan investasi kemudian membuka gerbang untuk kerja sama perdagangan lainnya antara Australia dan Tiongkok, pada tahun 2015, kedua negara menandatangani perjanjian ChAFTA (*China-Australia Free Trade Agreement*) yang berakibat pada stabilitas ekonomi dan perdagangan Australia serta Tiongkok.<sup>15</sup> Kebijakan ini akan

menyebabkan peningkatan aktifitas perdagangan yang signifikan antara Australia dan Tiongkok karena adanya penghapusan biaya masuk sehingga tidak ada lagi tarif hambatan.<sup>16</sup>

Keberhasilan dalam kerja sama perdagangan menjadikan Tiongkok sebagai mitra penting bagi Australia di kawasan Indo-Pasifik, karena itu lah memperkuat hubungan pertahanan dan keamanan menjadi kunci untuk membentuk hubungan bilateral yang lebih luas. Selain itu peningkatan kerja sama keamanan ini juga menjadi jaminan bagi Australia dalam menjaga kedaulatannya dari gangguan intervensi Tiongkok sekalipun dari negara-negara lain, karena saat ini Tiongkok menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam bab ini penulis juga menyebutkan tentang pandangan Australia terhadap kekuatan Amerika yang stabil dan konsisten di kawasan ini penting bagi keterbukaan dan kebebasan navigasi Indo-Pasifik, sehingga dalam beberapa dekade terakhir kebijakan luar negeri Australia cenderung berporos pada kebijakan yang diambil oleh Amerika.

Hal ini dilakukan oleh Australia untuk menjaga hubungan erat aliansinya dengan Amerika tanpa mengusik hubungan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok. Namun, penulis melihat bahwa dengan semakin

---

<sup>14</sup> Department of Foreign Affairs and Trade 2017, *Op.Cit*, hal.4

<sup>15</sup>“China-Australia Business Cooperation Enters the New Era of ChAFTA-driven Prosperity” *Embassy of the People’s Republic*

---

*of China in the Commonwealth of Australia*, diakses pada 6 Januari 2020, <http://au.china-embassy.org/eng/zagx/car3/t1506802.htm>

<sup>16</sup>“China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA)” *Asialink Bussines*, <https://asialinkbusiness.com.au/china/getting-started-in-china/china-australia-free-trade-agreement-chafta?doNothing=1>

meningkatnya persaingan kekuatan dan pengaruh antara Amerika dan Tiongkok, Australia semakin sering dihadapkan dengan pilihan apakah akan mendukung Amerika Serikat atau memilih untuk tidak terlibat.

### **Kebijakan Balancing dan Engaging Australia terhadap Meningkatnya Pengaruh Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik**

Pembahasan dalam bab ini akan berfokus pada implementasi kebijakan luar negeri Australia sebagai respon atas meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, peningkatan dan pembentukan kerja sama Australia dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, terutama negara-negara keanggotaan ASEAN sebagai upaya *balancing* yang dilakukan oleh Australia, serta upaya *engagement* yang dilakukan oleh Canberra untuk meningkatkan hubungannya dengan Tiongkok setelah dikeluarkannya *Foreign Policy White Paper 2017*.

Lingkungan internasional bersifat anarkis di mana tidak ada kekuatan ataupun otoritas tertinggi di atas negara, sehingga setiap negara tersebut harus bisa melindungi dan mempertahankan kepentingannya sendiri serta tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan kedaulatan.<sup>17</sup> Perubahan yang terjadi secara cepat dan meluas di kawasan Indo-Pasifik tidak hanya membawa peluang dan kesempatan yang besar bagi Australia sebagai negara yang berada di kawasan tersebut, namun juga membawa berbagai macam ketidakpastian, resiko, ancaman, dan juga bahaya

---

<sup>17</sup> Laura Neack, Op.Cit, hal. 14.

terhadap kedaulatan negaranya. Dalam menghadapi tantangan ini, Australia diharapkan bisa membentuk sebuah kebijakan yang sesuai dan bisa mengakomodasi perkembangan dan kepentingan nasionalnya.

Australia telah menjadikan konsep Indo-Pasifik sebagai acuan dalam merespon perubahan yang terjadi di kawasan regional dalam beberapa tahun terakhir. Indo-Pasifik menjadi sebuah mekanisme konseptual yang menjelaskan dan mengelola perubahan geo-politik dan geo-ekonomi dalam jangka waktu yang panjang.<sup>18</sup> Perubahan keseimbangan kekuatan dan relevansi pada kawasan ini dalam satu dekade terakhir telah mempengaruhi pengambilan keputusan banyak negara, terutama negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Salah satunya adalah terkait dengan pertumbuhan perekonomian dan militerisasi Tiongkok.

Kebangkitan Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik tentu mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik ini, apa lagi jika dikaitkan dengan hubungan Australia dan Amerika sebagai sekutu yang memiliki ikatan kerja sama yang telah lama dibangun. Australia melihat bahwa posisi Amerika yang menjadi kekuatan besar di kawasan tersebut telah ditantang oleh Tiongkok sehingga menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan kekuatan.<sup>19</sup> Perubahan ini lah yang kemudian membuat beberapa negara-

---

<sup>18</sup> Daniel Baldino dan Alan Boomfield, Op.Cit, hal. 4.

<sup>19</sup> Foreign Policy White Paper 2017, Op.Cit, hal. 1.

negara termasuk Australia, berusaha untuk menyesuaikan pendekatannya terhadap lingkungan internasional yang baru.

Selama dua dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi partner perdagangan terbesar bagi Australia bahkan melampaui gabungan hasil perdagangan Australia dengan Amerika dan Jepang. Namun, perbedaan kepercayaan, nilai, sistem politik, dan kepentingan membuat Tiongkok juga menjadi sebuah ancaman bagi perpolitikan Australia, yaitunya dalam perumusan kebijakan luar negeri Australia. Tiongkok yang menganut dan dipimpin oleh seorang otoritarianisme sangat bertolak belakang dengan pemerintahan demokratis Australia yang mengedepankan kebebasan berpendapat.<sup>20</sup>

Dalam merumuskan kebijakan luar negerinya, Australia berpedoman kepada *Foreign Policy White Paper 2017*, sebuah acuan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* Australia setelah *Foreign Policy White Paper* terakhir 14 tahun yang lalu. *White Paper* ini dibentuk dengan mempertimbangkan pendapat dan saran dari pejabat pemerintahan negara bagian dan teritori, perdana menteri dan pertahanan, individu-individu, serta organisasi yang terlibat langsung dalam proses konsultasi publik pembuatan dokumen kebijakan luar negeri Australia

---

<sup>20</sup> Otoritarian merupakan paham politik yang menekankan kekuasaan pada satu individu atau satu negara tanpa mempertimbangkan derajat kebebasan individu.

ini.<sup>21</sup> Melalui dokumen ini, Australia ingin mewujudkan masa depan di mana Canberra memiliki peran yang besar dalam menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, melalui peningkatan hubungan kerja sama multilateral dan bilateral, serta tetap menjaga hubungan baik dengan negara besar pemegang hegemoni.

*Foreign Policy White Paper* memang tidak secara khusus hanya membahas tentang kebijakan luar negeri Australia terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, namun dokumen ini banyak membicarakan tentang pendekatan, strategi, dan diplomasi yang harus diambil Australia untuk membentuk hubungan dengan Tiongkok dalam perkembangannya yang cepat. Pada dasarnya ada 5 hal penting yang disebutkan oleh Australia dalam *Foreign Policy White Paper 2017*, terkait dengan keamanan dan kedaulatan negara:

1. Menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan makmur di mana semua hak-hak yang dimiliki oleh setiap negara harus dihormati.
2. Menyediakan lebih banyak peluang bisnis bagi Australia secara global dan menentang konsep proteksionisme
3. Memastikan bahwa keamanan dan kebebasan masyarakat Australia tetap terlindungi dalam menghadapi ancaman seperti terorisme.
4. Mempromosikan hukum dan peraturan internasional yang mendukung dan menjamin

---

<sup>21</sup> *Foreign Policy White Paper 2017*, Op.Cit, hal. 1.

stabilitas dan kemakmuran, serta memungkinkan pembentukan kerja sama antar negara untuk menghadapi tantangan global.

5. Meningkatkan dukungan terhadap terciptanya kawasan Indo-Pasifik dan Timor Leste yang terbuka dan berdaulat.

Setelah keluarnya *Foreign Policy White Paper* 2017, ada beberapa perubahan sikap dan tindakan yang diambil oleh Australia terhadap implementasi kebijakan luar negeri, terutama dalam menghadapi dan mempertahankan kekuatan Amerika sebagai aliansi terbesar Australia di kawasan regional dan dalam menjaga hubungan kerja sama atau perdagangan dengan Tiongkok. Australia tetap menekankan peran Amerika sebagai negara dengan kekuatan besar yang bisa mengendalikan kekuatannya untuk mendukung kemerdekaan dan kedaulatan negara lain, memberikan perlindungan di luar kepentingannya sendiri, serta untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.

Ketegangan yang saat ini terjadi di kawasan Indo-Pasifik telah menyebabkan gangguan terhadap sistem perekonomian dan perdagangan global. Keamanan dan stabilitas kawasan ini menjadi tanggung jawab setiap negara dan karena itu lah negara-negara di kawasan ini harus memiliki visi yang sama dalam menciptakan kawasan yang bebas dan terbuka, dimana setiap negara memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing tanpa intervensi negara lain. Selain itu, hubungan bilateral antara Tiongkok dan Amerika yang positif, produktif, dan bebas konflik juga akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya kawasan Indo-

Pasifik yang damai.<sup>22</sup> Dalam bab ini, Implementasi kebijakan luar negeri Australia setelah dikeluarkannya *Foreign Policy White Paper* 2017 dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti politik atau pun perdagangan, di bidang pertahanan, dan juga pada kerja sama Hak Asasi Manusia.

Australia menginginkan perekonomian global yang didasarkan pada aturan dan hukum yang transparan dan kuat, bisa mempromosikan persaingan bisnis yang damai, investasi, ataupun perdagangan yang terbuka dan bebas, serta memiliki sistem regulasi yang dapat diprediksi dan non-diskriminatif. Pendekatan yang dilakukan Australia terhadap *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) adalah untuk memastikan bahwa inti dan fokus dari perjanjian ini masih sejalan dengan tujuan utama Australia untuk menciptakan perjanjian yang luas dan terbuka.<sup>23</sup> Keterbukaan dan perdagangan bebas akan sangat menguntungkan bagi pertumbuhan perekonomian Australia dan juga kesejahteraan global.

Saat ini untuk melindungi, meningkatkan, dan mencapai kepentingannya, Australia membuka peluang komersial yang baru dan meningkatkan kekuatan ekonominya melalui perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) bilateral ataupun regional.<sup>24</sup> Australia merupakan salah satu negara dengan ekonomi maju yang memiliki akses preferensial ke semua

pasar di kawasan Asia. Saat ini Australia telah membentuk perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik, namun beberapa diantaranya yang paling komprehensif dan ambisius dilaksanakan adalah dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

Selain itu, dalam melaksanakan pendekatan engagement Australia juga membuat rencana jangka panjang strategi pertahanan Australia yang ditetapkan dalam *Defense White Paper* pada tahun 2016 dan diperkuat dalam *Foreign Policy White Paper* 2017. Keduanya menjadi acuan bagi Australia untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian di masa yang akan datang, salah satunya adalah terkait dengan pertumbuhan kawasan Indo-Pasifik. Kawasan Indo-Pasifik kini menjadi pusat dari kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan dan keamanan maritim Australia. Berdasarkan dokumen ini lah Australia berupaya untuk menciptakan kawasan regional tanpa paksaan ataupun konflik di mana setiap negara memiliki peluang yang sama berdasarkan peraturan yang jelas dan adil.

Pendekatan terhadap negara dengan visi yang sama juga dilakukan karena menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam *Foreign Policy White Paper* 2017 adalah tentang kekuatan dan keberadaan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik yang sangat penting bagi keamanan dan stabilitas negara Australia. Karena itu lah Australia berharap Amerika Serikat bisa mempertahankan posisinya sebagai kekuatan global dengan kekuatan ekonomi, politik, dan keamanan strategis yang stabil. Kemungkinan terjadinya kemunduran Amerika dari kawasan Indo-Pasifik dan kemunculan

Tiongkok sebagai hegemoni terbesar yang baru akan memberikan kesulitan terbesar bagi Australia, maka dari itu Canberra mempersiapkan alternatif lain, yaitu dengan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, seperti negara-negara keanggotaan ASEAN, India, dan Jepang.<sup>25</sup>

Selain itu, Australia juga memiliki komitmen yang kuat terkait peningkatan kerja sama dengan negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik khususnya dengan negara-negara keanggotaan ASEAN. Pada tahun 2014, Australia secara resmi telah menjadi rekan kerja sama strategis bagi ASEAN dan mendukung komunitas ASEAN yang inklusif, serta memiliki integritas ekonomi. Saat ini, ASEAN termasuk ke dalam tiga besar rekan kerja sama perdagangan Australia, dan karena itulah Canberra memiliki ambisi menjadi partner kerja sama utama negara-negara pada kawasan Asia Tenggara dalam bidang keamanan, perekonomian, dan perkembangan infrastruktur untuk masa yang akan datang.<sup>26</sup>

Pada November 2019, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, juga mengumumkan seperangkat inisiatif terhadap kawasan Pasifik Selatan, termasuk dukungan terhadap pengembangan infrastruktur, mobilitas tenaga kerja, peningkatan kerja sama keamanan, dan memperkuat hubungan

---

<sup>26</sup> "ASEAN-Australia Relationship," 2018, *Department of Prime Minister and Cabinet*, diakses pada tanggal 23 Februari 2020, <https://aseanaustralia.pmc.gov.au/asean-australia/relations.html>

kerja sama dari orang ke orang. Kebijakan ini merupakan respon terhadap tantangan yang ada di kawasan regional Australia dan negara-negara di kepulauan Pasifik. Langkah-langkah yang diambil adalah berupa meningkatkan ketahanan cuaca dan iklim, menciptakan populasi yang sehat, berpendidikan, dan inklusif, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan ini lah yang akan memperkuat hubungan Australia dan Pasifik ke depannya.<sup>27</sup>

Kebangkitan Tiongkok telah memberikan peluang dan juga kekhawatiran dari Australia. Meskipun begitu, Australia melihat peran penting Tiongkok dalam memimpin peningkatan kekuatan kawasan Indo-Pasifik melalui integrasi ekonomi, perdagangan bebas, kebebasan bernavigasi, dan kedaulatan serta hak yang dilindungi.<sup>28</sup> Kapasitas Tiongkok dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mendukung keamanan regional dan global sedang tumbuh. Karena itu lah, terlepas dari ancaman yang disebabkan oleh Tiongkok, Australia mendukung Tiongkok meningkatkan kekuatannya dengan cara yang damai dan bisa menciptakan stabilitas kawasan, menghormati hukum internasional dan kepentingan dan hak negara-negara kecil.<sup>29</sup> Canberra berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama komprehensif dengan Tiongkok

melalui perjanjian bilateral perdagangan bebas, investasi yang berkembang, kerja sama untuk memerangi kejahatan transnasional, penelitian dan teknologi penting, serta turis dan migran.<sup>30</sup>

Australia berusaha untuk meningkatkan kerja sama ekonominya dengan Tiongkok melalui perjanjian dan perundingan bilateral yang bisa menciptakan hubungan yang erat dan saling terpercaya di antara kedua negara. Menteri Perdagangan dan Investasi Australia, Simon Brimingham, menjadi perwakilan Australia dalam *China International Import Expo* (CIIE) dan juga berpartisipasi dalam dialog tingkat senior terkait organisasi internasional *World Trade Organization* (WTO). CIIE merupakan salah satu acara utama Tiongkok untuk mempromosikan perdagangan dan hubungan ekonominya dengan dunia internasional. Pameran ini akan memberikan peluang yang besar bagi Australia untuk memamerkan produk dan layanan atau jasanya pada calon pembeli dari seluruh penjuru Tiongkok. Lebih dari 200 perusahaan Australia akan menghadiri acara ini dan membuktikan bahwa hubungan bilateral yang sangat menguntungkan bagi kedua negara ini telah membuka banyak kesempatan baru dan peluang pekerjaan bagi Australia.<sup>31</sup>

Usaha untuk meningkatkan hubungan bilateral Australia dan Tiongkok ini juga

---

<sup>27</sup> “Stepping up Australia’s Engagement wit Our Pacific’s Family,” *Department of Foreign Affairs and Trade*, diakses pada tanggal 25 Februari 2020, <https://www.dfat.gov.au/geo/pacific/engagement/Pages/stepping-up-australias-pacific-engagement.aspx>

<sup>28</sup> Ibid, hal. 38.

<sup>29</sup> Ibid.

---

<sup>31</sup> “Visit to China to Back Australian Reporters,” 2019, *Trade Minister of Australia*, diakses pada tanggal 5 Maret 2020, <https://www.trademinister.gov.au/minister/simon-birmingham/media-release/visit-china-back-australian-exporters>

mengalami tantangan dan kesulitan karena beberapa faktor yang datang dari kedua negara. Terlepas dari usaha dan pernyataan Australia untuk meningkatkan hubungan kemitraannya dengan Tiongkok dalam *Foreign Policy White Paper 2017*. Hubungan kedua negara ini sering mengalami gangguan atau *diplomatic rift*. Perbedaan pendapat Australia terhadap peran Tiongkok yang ambigu dalam kepentingan nasional Australia menimbulkan beberapa permasalahan dalam hubungan kerja sama bilateral kedua negara ini. Salah satunya adalah penurunan kerja sama perdagangan dan investasi diantara kedua negara yang terjadi dalam skala yang cukup besar. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Universitas Sydney dan KPMG, investasi Tiongkok di Australia turun hingga 11 persen, dari 15,4 miliar dolar Amerika pada tahun 2016, hingga 13,3 miliar dolar Amerika pada tahun 2017.<sup>32</sup>

## KESIMPULAN

Dari rangkaian kebijakan yang tertera dalam *Foreign Policy White Paper 2017*, yang menjadi acuan bagi kebijakan luar negeri Australia dalam satu dekade mendatang. Ada beberapa poin kebijakan luar negeri yang tidak diimplementasikan secara maksimal terkait pertumbuhan kekuatan dan pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan ataupun

implementasi kebijakan luar negeri Australia yang menggunakan pendekatan *balancing* dan *engagement* ini sulit untuk dilakukan. Meskipun pendekatan ini ditujukan untuk mengurangi kerugian akibat ketidakpastian di masa yang akan datang, namun, akan sangat sulit untuk menentukan tingkatan dari resiko ataupun tantangan yang akan dihadapi.

Dalam satu dekade ke depan Australia harus bisa meningkatkan citra dan kerja samanya di kawasan Indo-Pasifik di setiap bidang, baik ekonomi, politik, ataupun pertahanan. Dengan begitu tujuan Australia untuk menciptakan kawasan bebas dan terbuka dari hegemoni dimana setiap negara berhak untuk mengejar kepentingan nasionalnya akan tercapai dan kepentingan nasionalnya di kawasan Indo-Pasifik ini akan tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA :

### Buku:

- Baldwin, David A. 1993. *Neorealism nd Neoliberalism: The Contemporardy Debate*. Columbia University Press.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2017. *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mohctar, Mas'oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- PT.Pustaka LP3ES Indonesia, 1990.
- Neack, Laura. *The New Foreign Policy : Power Seeking in a Globalized Era Second Edition*. United States of America: Rowman and Littlefield Publisher Inc., 2008.

---

<sup>32</sup> Hans Hendrischke dan Wei Li, "Chinese Investment in Australia Falls as Political Debate hits Confidence," diakses pada tanggal 6 Maret 2020, <https://theconversation.com/chinese-investment-in-australia-falls-as-political-debate-hits-confidence-98144>

Miriam, Budiardjo. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Mohctar, Mas'ued. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

#### **Jurnal:**

Baldino, Daniel dan Alan Boomfield, "The Rise of Indo-Pacific in Australia grand-strategic Discourse," 2018, *Indo-Pacific Insight Series*, Vol. 18.

Chan, Lai-Ha. "Australia's Strategic Hedging in The Indo-Pacific : The Third Way beyond either China or US," 2019, *Australia-China Relations Institute*, hal. 1-16.

Purnama, Agung Citra. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (2017). "Gagasan Indonesia Mengenai Indo-Pacific Treaty: Prospek dan Masalah". Universitas Pertahanan: Bogor.

Scott, David. International Relations of The Asia-Pacific Advance Access (2013). "Australia's embrace of the 'Indo-Pacific': new term, new region, new strategy?" Brunel University: United Kingdom

Surugiu, Marius-Răzvan, and Camelia Surugiu. "International Trade, Globalization and Economic Interdependence between European Countries: Implications for Businesses and Marketing Framework". *Procedia Economics and Finance*. Vol. 32 (December 2015), 131-138.

#### **Media Lainnya:**

#### **Dokumen Resmi:**

Australian Government Foreign Policy White Paper 2017

#### **Website:**

Carrol, Jacinta. 2017. *Rapid Round up: Foreign Policy White Paper*. Australian National University. <https://www.policyforum.net/rapid-round-up-fp-white-paper/> diakses pada tanggal 14 Mei 2019, pukul 23:53 WIB

Khurana Gurpreet. 2018. The Origin of 'Indo-Pacific' as Geopolitical Construct. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2018/01/the-origin-of-indo-pacific-as-geopolitical-construct/> diakses pada 12 Mei 2019 – 06:25 WIB.

Medcalf, Rory. 2018. *Podcast: Diving Into The Indo-Pacific Debate*. Asia and The Pacific Society. <https://www.policyforum.net/diving-into-the-indo-pacific/> Diakses pada tanggal 14 Mei 2019 - 22:07 WIB

George Friedman, "Beyond The Post-Cold War World," 2013, diakses pada tanggal 04 November 2019, <https://worldview.stratfor.com/article/beyond-post-cold-war-world>

Sherlock, Stephen. "Australia Relation with China; What is The Problem?" diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, [https://www.aph.gov.au/sitecore/content/Home/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/Publications\\_Archive/CIB/CIB9697/97cib23#POWER](https://www.aph.gov.au/sitecore/content/Home/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/CIB/CIB9697/97cib23#POWER)

“Stepping up Australia’s Engagement with Our Pacific’s Family,” *Department of Foreign Affairs and Trade*, diakses pada tanggal 25 Februari 2020, <https://www.dfat.gov.au/geo/pacific/engagement/Pages/stepping-up-australias-pacific-engagement.aspx>

“Visit to China to Back Australian Reporters,” 2019, *Trade Minister*

*of Australia*, diakses pada tanggal 5 Maret 2020, <https://www.trademinister.gov.au/minister/simon-birmingham/media-release/visit-china-back-australian-exporters>